



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS BP3KP SUMATERA V TAHUN 2025-2029



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V periode 2025–2029 dapat tersusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran teknis di tingkat unit kerja atas Rencana Strategis tiap Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Sejalan dengan amanah pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, BP3KP Sumatera V sebagai unit pelaksana teknis berkomitmen menjalankan peran strategis dalam penyelarasan ekosistem perumahan melalui intervensi yang efektif di wilayah kerja Sumatera V.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BP3KP Sumatera V dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional sektor perumahan. Di dalamnya memuat visi, misi, sasaran strategis, serta arah kebijakan yang berfokus pada percepatan penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah. Dokumen ini juga menjadi dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), penganggaran (RKA-KL), hingga evaluasi kinerja (LAKIP) tahunan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi, dedikasi, dan kerja keras seluruh jajaran BP3KP Sumatera V serta dukungan dari pemerintah daerah dan mitra kerja terkait. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal demi menyukseskan Program Tiga Juta Rumah dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Palembang, 13 Februari 2026



Ir. Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera V



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-2
I.1 Kondisi Umum.....	I-2
I.2 Potensi dan Permasalahan	I-13
I.2.1 Potensi.....	I-13
I.2.2 Permasalahan	I-16
I.2.3 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera V	I-21
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	II-24
II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	II-24
II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	II-25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	III-1
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	III-1
III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	III-1
III.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	III-4
III.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	III-5
III.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	III-7
III.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	III-9
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	III-11
III.3 Kerangka Kelembagaan.....	III-12

III.4 Analisis Kebutuhan dan Profil Sumber Daya Manusia BP3KP Sumatera V	III-17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	IV-20
IV.1 Target Kinerja.....	IV-20
IV.2 Kerangka Pendanaan	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Karakteristik Luasan Wilayah, Elevasi, dan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.....	I-3
Tabel 1. 2 Kepadatan Penduduk Pulau Sumatera Tahun 2021-2025	I-5
Tabel 1. 3 Jumlah dan Indikator Kemiskinan Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V	I-6
Tabel 1. 4 Tabel Komparatif Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Tahun 2024.....	I-6
Tabel 1. 5 <i>Backlog</i> Perumahan di Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V	I-9
Tabel 1. 6 Target, Realisasi, dan Capaian Kegiatan Bidang Perumahan BP2P Sumatera V Tahun 2020-2024.....	I-11
Tabel 1. 7 Tabel Distribusi Pengeluaran Per Kapita Kelompok 40 Persen Terbawah (Desil 1–4) dan Gini Rasio	I-17
Tabel 1. 8 Upah Minimum Provinsi, Rata-Rata Pendapatan di Sektor Informal, dan Harga Rumah Subsidi	I-18
Tabel 1. 9 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera V	I-21
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	III-2
Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	III-4
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	III-5
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	III-8
Tabel 3. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	III-10
Tabel 3. 6 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera V	III-11
Tabel 4. 1 Target Kinerja BP3KP Sumatera V	IV-20
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera V	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Sebaran Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V	I-3
Gambar 2. 1 Pohon Strategis BP3KP Sumatera V (Sasaran Strategis 1)	II-27
Gambar 2. 2 Pohon Strategis BP3KP Sumatera V (Sasaran Strategis 2)	II-28
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).....	III-14
Gambar 3. 2 Hubungan Kerja Unit Organisasi (Pusat), UPT (Balai), Perbendaharaan (Kesatkeran), dan Pemerintah Daerah	III-16
Gambar 3. 3 Analisis Jabatan Teknis dan Non-Teknis BP3KP Sumatera V .	III-18

Bab I
Bab I
Bab I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Selaras dengan hal tersebut, setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman tersebut karena infrastruktur dan rumah merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dibentuk sebanyak 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu balai yang terbentuk di pulau Sumatera adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BP3KP Sumatera V memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah BP3KP Sumatera V dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V

Wilayah kerja BP3KP Sumatera V memiliki karakteristik tipologi kawasan yang unik dan beragam, yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penyediaan perumahan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, karakteristik luas wilayah, topografi, dan risiko bencana dirangkum dalam Tabel berikut.

Tabel 1. 1 Karakteristik Luasan Wilayah, Elevasi, dan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung

Uraian	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Provinsi Lampung	Sumber
Luas Wilayah	±91.592 km ²	±9.403 km ²	±34.624 km ²	<i>BPS Provinsi Dalam Angka 2025</i>
Wilayah <100 mdpl	±60–70%	±75–85%	±55–60%	<i>RTRW</i>
Wilayah 0–25 mdpl	±30–35%	±35–45%	±20–25%	<i>Analisis DEMNAS BIG (akses 2025) & RTRW</i>

Uraian	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Provinsi Lampung	Sumber
Karakter Fisik Dominan	Dataran rendah, rawa lebak & pasang surut, DAS Musi	Kepulauan, dataran pantai, lahan pasca tambang	Dataran pesisir timur & selatan, perbukitan Bukit Barisan	<i>Analisis DEMNAS BIG (akses 2025) & RTRW</i>
Risiko Bencana Dominan	Banjir, kebakaran hutan/lahan	Banjir, Abrasi pantai, Cuaca ekstrem	Banjir, Longsor, Gempa & Tsunami (pesisir selatan)	<i>InaRisk BNPB</i>
Kategori Risiko Bencana	Sedang–Tinggi (hilir Musi)	Sedang (pesisir & dataran rendah)	Sedang–Tinggi (pesisir & perbukitan)	<i>InaRisk BNPB</i>

Berdasarkan publikasi BPS Provinsi dalam Angka Tahun 2025, Wilayah kerja BP3KP Sumatera V mencakup tiga (3) provinsi dengan total luas ± 135 ribu km², yang terdiri atas Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ± 91.592 km², Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 9.403 km², dan Provinsi Lampung seluas ± 34.624 km². Analisis topografi berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) dan dokumen RTRW masing-masing provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kerja BP3KP Sumatera V berada pada elevasi rendah. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sekitar 60–70% wilayah pada elevasi <100 mdpl, dengan ± 30 –35% berada pada elevasi sangat rendah (0–25 mdpl). Provinsi Lampung memiliki ± 55 –60% wilayah pada elevasi <100 mdpl dan sekitar 20–25% pada elevasi 0–25 mdpl. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi wilayah <100 mdpl sebesar ± 75 –85%, dengan sekitar 35–45% berada pada elevasi 0–25 mdpl.

Berdasarkan pemetaan risiko bencana InaRisk BNPB Tahun 2023–2024, wilayah dataran rendah dan pesisir tersebut berkorelasi dengan tingkat risiko banjir kategori sedang hingga tinggi di Sumatera Selatan bagian hilir dan sebagian Lampung, serta risiko abrasi dan genangan pesisir di Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara spasial, wilayah kerja BP3KP Sumatera V memiliki tingkat kerentanan hidrometeorologi yang signifikan, sehingga kebijakan penyediaan perumahan, termasuk pembangunan rumah khusus, perlu mempertimbangkan prinsip hunian tangguh bencana.

Tabel 1. 2 Kepadatan Penduduk Pulau Sumatera Tahun 2021-2025

Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Aceh	92	95	96	98	99
Sumatera Utara	205	209	212	215	218
Sumatera Barat	133	134	137	139	140
Riau	75	74	74	75	76
Jambi	72	74	75	76	77
Sumatera Selatan	93	100	101	102	103
Bengkulu	102	102	104	105	106
Lampung	262	273	277	281	284
Kepulauan Bangka Belitung	90	90	91	92	93
Kepulauan Riau	258	264	260	264	268

Sumber: Data Kependudukan BSPS Tahun 2021-2025

Provinsi Lampung mencatat laju pertumbuhan penduduk rata-rata $\pm 1,15\%$ per tahun (periode 2021–2025), lebih tinggi dibanding beberapa provinsi lain di Sumatera. Tingkat urbanisasi Lampung mencapai sekitar 53–55%, dengan konsentrasi terbesar di Kota Bandar Lampung dan wilayah penyangga (Lampung Selatan dan Pesawaran). Berdasarkan data BPS Provinsi Dalam Angka Tahun 2025, tingkat kepadatan penduduk di wilayah kerja BP3KP Sumatera V menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, di mana Provinsi Lampung memiliki kepadatan tertinggi sebesar 284 jiwa/km², Provinsi Sumatera Selatan sebesar 103 jiwa/km², dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar ± 93 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Provinsi Lampung, serta konsentrasi penduduk pada Kawasan Metropolitan Palembang di Sumatera Selatan, menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kebutuhan penyediaan hunian yang layak, keterbatasan ketersediaan lahan, serta potensi konversi lahan produktif menjadi kawasan terbangun, sehingga diperlukan perencanaan perumahan yang terarah, efisien, dan selaras dengan pengendalian tata ruang.

Tabel 1. 3 Jumlah dan Indikator Kemiskinan Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
Sumatera Selatan	919,6	10,15	1,642	0,371
Kep. Bangka Belitung	76,5	4,11	0,803	0,178
Lampung	887,02	10,00	1,529	0,351

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) Kemiskinan BPS, 2025

Jumlah penduduk miskin di wilayah kerja BP3KP Sumatera V tercatat sebesar 919,60 ribu jiwa (10,15%) di Provinsi Sumatera Selatan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,642 dan Indeks Keparahan (P2) 0,371; 887,02 ribu jiwa (10,00%) di Provinsi Lampung dengan P1 1,529 dan P2 0,351; serta 76,50 ribu jiwa (4,11%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan P1 0,803 dan P2 0,178. Secara komparatif, meskipun persentase kemiskinan Sumatera Selatan dan Lampung relatif berimbang, kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih tinggi dibanding Bangka Belitung menunjukkan tekanan kesejahteraan yang lebih signifikan, sehingga memperkuat urgensi intervensi program perumahan bersubsidi dan rumah khusus bagi MBR, khususnya pada kelompok desil 1–4 yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Tabel 1. 4 Tabel Komparatif Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Tahun 2024

Lapangan Usaha	Sumatera Selatan (%)	Kepulauan Bangka Belitung (%)	Lampung (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,56	20,27	26,21
Pertambangan dan Penggalian	24,60	7,55	5,11
Industri Pengolahan	18,27	20,60	18,93
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,11	0,10
Pengadaan Air, Sampah, Limbah	0,10	0,02	0,10
Konstruksi	10,80	9,10	9,47
Perdagangan Besar dan Eceran	13,85	15,36	14,25
Transportasi dan Pergudangan	2,50	4,85	7,44
Akomodasi dan Makan Minum	2,01	3,25	1,61
Informasi dan Komunikasi	3,00	2,35	3,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	1,96	1,99
Real Estate	2,94	3,39	2,63
Administrasi Pemerintahan	2,51	5,48	3,09
Jasa Pendidikan	2,03	3,13	2,84
Jasa Kesehatan dan Sosial	0,63	1,36	1,00
Jasa Lainnya	0,70	0,92	1,16

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Perbandingan struktur PDRB tahun 2024 menunjukkan karakteristik ekonomi yang berbeda pada tiga provinsi wilayah kerja BP3KP Sumatera V. Provinsi Sumatera Selatan memiliki total PDRB mencapai sekitar Rp 670–700 triliun didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 150–170 triliun (24,60%), diikuti Industri Pengolahan Rp 120–135 triliun (18,27%) dan Perdagangan (13,85%), menunjukkan struktur ekonomi berbasis ekstraktif dan industri. Kepulauan Bangka Belitung memiliki total PDRB sekitar Rp 120–130 triliun dan memiliki struktur yang relatif seimbang dengan kontribusi terbesar pada Industri Pengolahan (20,60%), Pertanian (20,27%), serta Perdagangan (15,36%). Sementara itu, total PDRB Provinsi Lampung sekitar Rp 480–500 triliun didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 135–150 triliun (26,21%), diikuti Industri Pengolahan Rp 85–95 triliun (18,93%) dan Perdagangan Rp 60–70 triliun (14,25%), mencerminkan basis ekonomi agraris dan agroindustri yang kuat. Perbedaan struktur ini menjadi dasar potensi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

Dari aspek tata ruang, struktur ruang wilayah kerja BP3KP Sumatera V ditandai oleh keberadaan pusat-pusat kegiatan nasional dan wilayah, seperti Kawasan Metropolitan Palembang, Kawasan Perkotaan Bandar Lampung, serta pusat kegiatan wilayah di Pangkalpinang dan Tanjung Pandan. Sistem jaringan prasarana utama didukung oleh koridor Jalan Lintas Sumatera, pelabuhan laut strategis (Boom Baru, Panjang, Tanjung Api-Api), serta simpul transportasi udara yang menghubungkan antar provinsi.

Secara umum, komposisi guna lahan eksisting pada ketiga provinsi masih didominasi oleh kawasan budi daya berbasis sumber daya alam. Di Sumatera Selatan, kawasan pertanian, perkebunan, dan kehutanan mendominasi lebih dari 60% wilayah daratan, dengan kawasan permukiman terkonsentrasi pada koridor Sungai Musi dan pusat perkotaan. Di Lampung, penggunaan lahan pertanian dan perkebunan (termasuk komoditas pangan dan perkebunan rakyat) mencakup lebih dari 50% wilayah, sedangkan kawasan terbangun berkembang pesat di wilayah pesisir timur dan sekitar Bandar Lampung. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kawasan

perkebunan, pertambangan timah, serta kawasan pesisir, dengan permukiman tersebar mengikuti garis pantai dan pusat kota utama.

Dalam rencana pola ruang RTRW masing-masing provinsi yang berlaku hingga tahun 2025, kawasan permukiman direncanakan berkembang pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, termasuk penguatan Kawasan Metropolitan Palembang, pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, serta penguatan pusat pertumbuhan di Pangkalpinang dan Belitung. Proporsi kawasan budi daya permukiman dalam rencana pola ruang mengalami peningkatan seiring proyeksi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, namun tetap diarahkan agar tidak mengganggu kawasan lindung, kawasan resapan air, dan sempadan sungai/pantai.

Selain itu, terdapat kawasan aglomerasi dan wilayah penyangga yang berperan signifikan, seperti aglomerasi Palembang–Banyuasin–Ogan Ilir, kawasan Bandar Lampung–Lampung Selatan–Pesawaran, serta keterkaitan Pangkalpinang dengan kabupaten sekitarnya. Kawasan-kawasan ini menunjukkan kecenderungan perluasan permukiman ke wilayah pinggiran (*urban sprawl*) yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang serta penyediaan hunian terencana. Perkembangan kawasan terbangun cenderung mengikuti koridor ekonomi dan jaringan transportasi utama, yang dalam beberapa kasus bersinggungan dengan kawasan rawan bencana dan lahan produktif.

Keragaman karakteristik geografis dan sosiologis di ketiga provinsi ini menuntut BP3KP Sumatera V untuk menerapkan strategi pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berbasis mitigasi bencana. Tantangan fisik dan demografis tersebut terkonfirmasi secara kuantitatif melalui data *backlog* perumahan yang menunjukkan urgensi penanganan spesifik di ketiga provinsi. Berdasarkan data *dashboard* MyPKP, Provinsi Lampung mencatat angka total *backlog* perumahan tertinggi di wilayah kerja BP3KP Sumatera V, yakni mencapai 37,04%, yang didominasi oleh tingginya *backlog* Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 25,94%. Kondisi serupa terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total *backlog* sebesar 36,15%, di mana isu kualitas hunian (RTLH) juga menjadi faktor dominan dengan angka 25,99%, sedikit lebih tinggi dibanding Lampung,

yang mengindikasikan perlunya prioritas utama pada program peningkatan kualitas rumah swadaya. Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan total *backlog* sebesar 29,90%; meskipun secara agregat lebih rendah dibanding dua provinsi lainnya, Sumatera Selatan memiliki persentase *backlog* kepemilikan tertinggi di antara ketiga wilayah tersebut, yaitu sebesar 12,34% (dibandingkan Lampung 11,10% dan Bangka Belitung 10,16%), yang mengisyaratkan tingginya kebutuhan akan penyediaan unit hunian baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Disparitas data ini menjadi landasan bagi BP3KP Sumatera V dalam merumuskan proporsi intervensi antara program pembangunan baru dan peningkatan kualitas di masing-masing provinsi.

Tabel 1. 5 Backlog Perumahan di Wilayah Kerja BP3KP Sumatera V

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
Provinsi Sumatera Selatan				
1	Kota Palembang	99.389	36.899	136.288
2	Kab. Banyuasin	25.323	72.282	97.605
3	Kab. Ogan Komering Ilir	31.644	53.744	85.388
4	Kab. Musi Banyuasin	23.854	49.621	73.475
5	Kab. Muara Enim	23.892	34.703	58.595
6	Kab. Ogan Ilir	20.527	37.065	57.592
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	19.057	27.457	46.514
8	Kab. Lahat	13.898	30.778	44.676
9	Kab. Musi Rawas	13.436	30.400	43.836
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9.139	31.751	40.890
11	Kab. Ogan Komering Ulu	18.728	20.486	39.214
12	Kab. Empat Lawang	6.148	19.758	25.906
13	Kab. Musi Rawas Utara	7.905	13.380	21.285
14	Kota Lubuklinggau	12.910	6.654	19.564
15	Kota Pagar Alam	6.807	12.725	19.532
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.028	9.491	16.519
17	Kota Prabumulih	8.366	8.010	16.376
	Total	348.051	495.204	843.255
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	Kab. Bangka	10.885	40.107	50.992
2	Kab. Bangka Tengah	6.791	28.149	34.940
3	Kota Pangkal Pinang	11.345	19.069	30.414
4	Kab. Bangka Selatan	5.692	22.691	28.383
5	Kab. Bangka Barat	3.728	12.398	16.126
6	Kab. Belitung	7.399	5.009	12.408
7	Kab. Belitung Timur	5.807	4.659	10.466
	Total	51.647	132.082	183.729
Provinsi Lampung				
1	Kab. Lampung Tengah	46.320	141.208	187.528
2	Kab. Lampung Timur	34.827	129.992	164.819

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
3	Kab. Lampung Utara	23.269	86.279	109.548
4	Kota Bandar Lampung	65.838	32.669	98.507
5	Kab. Tanggamus	21.003	77.292	98.295
6	Kab. Lampung Selatan	38.235	43.607	81.842
7	Kab. Way Kanan	15.433	60.083	75.516
8	Kab. Pesawaran	18.029	34.834	52.863
9	Kab. Tulang Bawang	13.074	33.542	46.616
10	Kab. Tulang Bawang Barat	9.520	37.076	46.596
11	Kab. Pringsewu	16.255	23.685	39.940
12	Kab. Lampung Barat	7.198	31.007	38.205
13	Kab. Mesuji	5.503	18.431	23.934
14	Kab. Pesisir Barat	4.956	12.863	17.819
15	Kota Metro	8.192	3.091	11.283
	Total	327.652	765.659	1.093.311
	Grand Total	727.350	1.392.945	2.120.295

Sumber: Dashboard MyPKP, 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V (nomenklatur lembaga sebelum mengalami reorganisasi menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) telah melaksanakan berbagai kegiatan bidang perumahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Target, Realisasi, dan Capaian Kegiatan Bidang Perumahan BP2P Sumatera V Tahun 2020-2024

Kegiatan	Satuan	Tahun															Total	
		2020			2021			2022			2023			2024			Target	Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	9	12	133,33	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	3	3	100,00	30	33
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	847	847	100,00	596	619	103,86	1.950	2.293	117,59	675	675	100,00	4068	4434
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	17.545	17.545	100,00	12.223	7.220	59,07	12.332	12.332	100,00	10.048	10.035	99,87	8.318	8.278	99,52	60466	55410
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	3	6	200,00	34	34	100,00	1	1	100,00	-	-	-	-	-	-	38	41
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	100,00	-	-	-	16	16
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	64	64	100,00	314	320	101,91	261	261	100,00	119	119	100,00	150	150	100,00	908	914
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	8	4	50,00	2	1	50,00	6	6	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	20	15

Kegiatan	Satuan	Tahun															Total	
		2020			2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00	3	3	100,00	5	5
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	11	11
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	19	19
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	19	19

Sumber: LAKIP BP2P Sumatera V Tahun 2020-2024

Berdasarkan data evaluasi kinerja pada Tabel 1.6, teridentifikasi beberapa kegiatan yang realisasi capaiannya belum memenuhi target 100%. Pada kegiatan “Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara” Tahun Anggaran 2020 dan 2021, capaian fisik hanya terealisasi sebesar 50%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi pagu anggaran yang tersedia, sehingga tidak memadai untuk mengakomodasi keseluruhan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada kegiatan “Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya” untuk Tahun Anggaran 2021, 2023, dan 2024, target kinerja juga tidak tercapai sepenuhnya. Kendala utama pada kegiatan ini adalah tidak terealisasinya penyaluran bantuan di lapangan, sehingga dilakukan pengembalian sisa dana (sisa stok opname) ke Kas Negara.

I.2 Potensi dan Permasalahan

I.2.1 Potensi

Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V memiliki kedudukan strategis dalam mendukung visi nasional melalui dua dimensi potensi utama, yaitu potensi kelembagaan dan potensi kewilayahan.

1. Potensi Kelembagaan dan Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP bertransformasi menjadi simpul utama implementasi kebijakan yang tidak lagi terkotak-kotak oleh deliniasi kawasan, melainkan berbasis pada pendekatan pengembangan wilayah yang terpadu. BP3KP memiliki mandat menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik, hingga serah terima aset. Hal ini memungkinkan akselerasi program prioritas nasional (seperti Program 3 Juta Rumah) dapat dieksekusi lebih cepat tanpa hambatan birokrasi lintas sektoral. Di samping itu, komitmen BP3KP Sumatera V dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi modal dasar tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik dan *stakeholder* terhadap layanan Balai.

2. Potensi Kewilayahan dan Karakteristik Daerah

Wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki karakteristik khas yang menjadi peluang pengembangan perumahan:

a. Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan strategis yang didukung oleh struktur ruang kawasan metropolitan Palembang Raya (Patungraya Agung) sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kota Palembang, yang menetapkan Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Rencana pola ruang provinsi mengalokasikan kawasan budidaya permukiman perkotaan pada koridor pengembangan timur–barat serta kawasan penyangga sebagai zona pengembangan permukiman dan perkotaan baru, yang secara spasial mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang koridor LRT Palembang. Dari sisi eksisting, kepadatan penduduk Kota Palembang telah mencapai lebih dari 4.000 jiwa/km², jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir yang masih di bawah 500 jiwa/km², sehingga menunjukkan adanya disparitas distribusi penduduk dan peluang redistribusi hunian ke wilayah hinterland yang masih memiliki ketersediaan lahan relatif luas. Integrasi antara kebijakan pola ruang, sistem pusat permukiman, dan infrastruktur transportasi massal ini menjadi dasar teknokratis bagi BP3KP Sumatera V dalam merancang strategi pengembangan hunian vertikal berbasis TOD di pusat kota sekaligus mendorong pengembangan kawasan permukiman skala besar di wilayah penyangga secara terencana dan berkelanjutan.

b. Provinsi Lampung

Sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung memiliki laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan Provinsi Lampung Dalam Angka 2025 (BPS, 2025), persentase penduduk perkotaan Provinsi Lampung telah mencapai

52,91% dari total penduduk, menunjukkan tingkat urbanisasi yang sudah melewati separuh populasi dan mengindikasikan tekanan kebutuhan hunian di kawasan perkotaan, khususnya di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan wilayah penyangga Lampung Selatan. Dari sisi struktur ekonomi, distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 26,21%, diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,93%, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,25% terhadap total PDRB Provinsi Lampung. Komposisi ini menegaskan bahwa Lampung memiliki basis ekonomi primer dan industri pengolahan yang kuat, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor—termasuk skema CSR/TJSL—dalam mendukung penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman terencana. Potensi pasar (*demand*) perumahan akan semakin besar, khususnya bagi tenaga kerja industri dan komuter, yang membuka peluang kerja sama skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi spasial yang dipengaruhi oleh kawasan pertambangan timah yang secara legal dialokasikan dalam Perda Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW 2024–2044, dengan luas Kawasan Pertambangan Mineral Logam 31.791 hektare yang tersebar di Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Merawang, Pemali, dan Mendo Barat. Ketentuan zonasi RTRW juga mengatur kegiatan pasca-tambang termasuk rehabilitasi dan pemanfaatan lanjutan, sehingga lahan yang telah direklamasi dan berstatus *clean and clear* berpotensi dikonsolidasikan sebagai cadangan lahan strategis untuk pengembangan permukiman secara terarah sesuai ketentuan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Di sisi lain, penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang

RIPPARNAS) memperkuat kebutuhan dukungan hunian di koridor wisata, sehingga secara spasial dan regulatif terbuka peluang pengembangan permukiman dan Sarana Hunian Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

3. Potensi Kolaborasi Lintas Sektor

Struktur ekonomi wilayah kerja BP3KP Sumatera V menunjukkan dominasi sektor-sektor basis yang memiliki kapasitas korporasi besar dan relevan untuk kolaborasi pembiayaan non-APBN. Di Provinsi Sumatera Selatan, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 23,44% terhadap PDRB, disusul Industri Pengolahan 18,92% dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,57% (BPS, 2025). Di Provinsi Lampung, struktur PDRB didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,63%, Industri Pengolahan 19,41%, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,78% (BPS, 2025). Sementara itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbang 19,87% terhadap PDRB, diikuti Industri Pengolahan 17,46% dan Perdagangan Besar dan Eceran 13,22% (BPS, 2025). Komposisi sektoral tersebut menegaskan keberadaan perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan yang berpotensi menjadi mitra strategis dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan kualitas hunian MBR secara berkelanjutan.

I.2.2 Permasalahan

Meskipun memiliki berbagai potensi, BP3KP Sumatera V menghadapi tantangan dan permasalahan kompleks dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) yang diproyeksikan masih akan mempengaruhi kinerja jangka menengah jika tidak ditangani secara komprehensif.

1. Tantangan *Backlog* dan Ketimpangan Pasar (*Supply-Demand Gap*)
Permasalahan mendasar adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan rumah (*mismatch*).

a. Sisi Permintaan (*Demand*)

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), dan *Dashboard* Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V masih sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi disebabkan oleh profil pendapatan masyarakat yang didominasi oleh kelompok desil 1 hingga desil 4 (40% penduduk termiskin). Berikut merupakan rincian dari Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita oleh kelompok desil 1 hingga desil 4 (40% penduduk termiskin).

Tabel 1. 7 Tabel Distribusi Pengeluaran Per Kapita Kelompok 40 Persen Terbawah (Desil 1–4) dan Gini Rasio

Provinsi	Persentase Pengeluaran Per Kapita 40% Terbawah (%)	Gini Rasio
Sumatera Selatan	21,270	0,311
Kepulauan Bangka Belitung	22,430	0,298
Lampung	20,990	0,320

Sumber: BPS Provinsi, Susenas Maret 2025

Distribusi pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa kelompok 40 persen penduduk termiskin (Desil 1–4) di Provinsi Sumatera Selatan menikmati 21,270% dari total pengeluaran, di Provinsi Lampung sebesar 20,990%, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 22,430%. Proporsi ini menggambarkan bahwa hampir separuh populasi di ketiga provinsi tersebut memiliki daya beli relatif terbatas dibandingkan kelompok menengah dan atas. Nilai Gini Rasio yang berada pada kisaran 0,298–0,320 menunjukkan tingkat ketimpangan dalam kategori sedang, dengan Lampung memiliki ketimpangan relatif lebih tinggi dibanding dua provinsi lainnya. Hal ini

memperlihatkan bahwa basis Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah kerja BP3KP Sumatera V masih signifikan secara struktural, sehingga intervensi penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas rumah menjadi kebutuhan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan

Di Provinsi Lampung, tantangan keterjangkauan sangat nyata mengingat rata-rata pengeluaran per kapita yang relatif rendah, sehingga mayoritas pendapatan rumah tangga habis terserap untuk kebutuhan pokok, menyisakan ruang fiskal yang sempit untuk cicilan perumahan. Kondisi serupa terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana tingginya angka *backlog* (di atas 36%) mengindikasikan harga hunian pasar telah melampaui daya beli kelompok desil 1–4.

Sementara itu, meskipun Provinsi Sumatera Selatan memiliki total *backlog* terendah (29,90%), *backlog* kepemilikan Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang tertinggi sebesar 12,34%. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama bagi kelompok MBR di Sumatera Selatan, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Palembang, adalah akses terhadap kepemilikan aset (*home ownership*). Kesenjangan antara harga properti perkotaan dengan pendapatan riil masyarakat menyebabkan kelompok ini sulit memenuhi persyaratan perbankan, sehingga intervensi pasar yang ada saat ini dinilai belum efektif menjangkau kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Tabel 1. 8 Upah Minimum Provinsi, Rata-Rata Pendapatan di Sektor Informal, dan Harga Rumah Subsidi

Provinsi	Upah Minimum Provinsi Tahun 2025	Rata-Rata Pendapatan di Sektor Informal	Harga Rumah Subsidi (Juta)
Sumatera Selatan	3.681.571	1.880.783	166
Kepulauan Bangka Belitung	3.876.600	2.394.943	173
Lampung	2.893.070	1.612.586	166

Sumber: Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal Menurut Provinsi, BPS, 2025; SIKUMBANG

Berdasarkan Tabel 1.8, terlihat adanya ketidakseimbangan antara rata-rata pendapatan masyarakat dan harga pasar properti di tiga provinsi wilayah kerja BP3KP Sumatera V. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.681.571 per bulan dan pendapatan sektor informal sebesar Rp1.880.783 per bulan, sementara harga rumah subsidi mencapai Rp 166 juta. UMP Di Provinsi Lampung sebesar Rp2.893.070 dan pendapatan sektor informal hanya Rp1.612.586 per bulan dengan harga rumah subsidi Rp 166 juta. Adapun UMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp3.876.600 dan pendapatan di sektor informal sebesar Rp2.394.943 per bulan dengan harga rumah subsidi sekitar Rp 173 juta. Secara rasio, harga rumah tersebut setara sekitar 45–57 kali pendapatan bulanan pekerja formal dan dapat melebihi 70–100 kali pendapatan pekerja informal, yang menunjukkan bahwa akses kepemilikan hunian bagi mayoritas MBR masih sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dan subsidi, sehingga penguatan skema intervensi keterjangkauan penting dalam rencana strategis masing-masing provinsi.

b. Sisi Pasokan (*Supply*)

Pengembang menghadapi kendala tingginya biaya konstruksi akibat inflasi bahan bangunan dan harga lahan yang terus naik, terutama di kawasan perkotaan Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Palembang, Sumatera Selatan, mencapai 88,67 poin. Indeks ini mencerminkan tingkat kemahalan harga bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah tenaga kerja di wilayah tersebut. Adapun tren inflasi umum di Sumatera Selatan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen. Meskipun inflasi umum ini mencakup seluruh komoditas, tren ini menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup dan harga barang, termasuk bahan baku material.

2. Isu Teknis dan Karakteristik Wilayah

Kondisi geografis spesifik di wilayah kerja menimbulkan tantangan teknis tersendiri:

- a. Di Sumatera Selatan, biaya konstruksi dan pematangan lahan di area rawa jauh lebih tinggi dibandingkan lahan kering, yang seringkali tidak terakomodasi dalam standar harga satuan bantuan pemerintah.
- b. Masih tingginya sengketa kepemilikan lahan sering menghambat dalam pemenuhan *Readiness Criteria* (RC) untuk program pembangunan Rusun, PSU, maupun bantuan BSPS. Terdapat permasalahan contohnya Rumah Susun Pekerja Srijaya sebanyak 75 unit di Kota Palembang yang belum dihuni sejak dibangun tahun 2009 dikarenakan permasalahan lahan.

3. Keterbatasan Dukungan Eksternal dan Kolaborasi

- a. Masih adanya ketergantungan pada APBN, partisipasi sektor swasta dan *stakeholder* di luar bidang perumahan (CSR BUMN/Swasta) masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan dengan baik.
- b. Pemahaman dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah dalam mendukung program perumahan (seperti penyediaan lahan matang dan pengelolaan pasca-konstruksi) masih bervariasi, sehingga seringkali menghambat proses serah terima aset.

4. Permasalahan Internal Kelembagaan

- a. Jumlah pegawai BP3KP Sumatera V belum sebanding dengan luasnya cakupan wilayah kerja (3 Provinsi) dan besarnya target fisik yang dibebankan. Hal ini menyebabkan beban kerja ganda (*multitasking*) yang berisiko menurunkan fokus pengawasan teknis dan kualitas pengendalian proyek.
- b. Data *baseline* perumahan (RTLH dan *Backlog*) di daerah seringkali tidak mutakhir (*up-to-date*), menyebabkan potensi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

I.2.3 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera V

Sebagai tindak lanjut dari analisis kondisi umum wilayah kerja, disusunlah analisis SWOT untuk memetakan posisi BP3KP Sumatera V saat ini. Analisis ini mengelompokkan berbagai faktor penentu keberhasilan ke dalam aspek internal (kekuatan dan kelemahan) serta aspek eksternal (peluang dan tantangan). Pemetaan ini berfungsi sebagai navigasi utama dalam penyusunan arah kebijakan Balai ke depan. Berikut adalah rincian Matriks SWOT BP3KP Sumatera V.

Tabel 1. 9 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera V

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar hukum Permen No. 1/2025 memberikan kewenangan integratif (perencanaan s.d. serah terima aset) tanpa sekat delineasi kawasan.2. Balai sebagai "ujung tombak" Kementerian di daerah, memiliki akses langsung koordinasi pusat-daerah.3. Komitmen atas tata kelola melalui penerapan Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi yang meningkatkan akuntabilitas layanan.4. Kemampuan melaksanakan berbagai tipologi perumahan (Rusun, Rusus, PSU, BSPS) dalam satu kendali.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah personil tidak sebanding dengan luas wilayah kerja (3 Provinsi) dan target fisik yang besar, menyebabkan beban kerja ganda (<i>multitasking</i>).2. Data <i>baseline</i> (<i>backlog</i> & RTLH) di daerah sering tidak mutakhir, berisiko pada ketidaktepatan sasaran.3. Sangat bergantung pada APBN dan belum memiliki fleksibilitas optimal dalam mengelola pembiayaan alternatif.4. Kesulitan pengawasan intensif pada lokasi-lokasi terpencil/kepulauan (Kepulauan Bangka Belitung).

Faktor Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing provinsi memiliki potensi wilayah. 2. Keberadaan industri besar (tambang/perkebunan) di wilayah kerja sebagai sumber pendanaan non-APBN. 3. Prioritas Program 3 Juta Rumah membuka kanal dukungan politik dan anggaran yang lebih besar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya <i>backlog</i> (Lampung & Kepulauan Bangka Belitung >30%) kontraksi dengan daya beli MBR yang rendah. 2. Inflasi harga bahan bangunan dan kenaikan harga lahan di perkotaan menghambat minat pengembang subsidi. 3. Biaya konstruksi tinggi di lahan rawa (Sumatera Selatan) dan maraknya sengketa lahan/ketidakesesuaian RTRW. 4. Komitmen dan kemampuan fiskal Pemda yang bervariasi dalam mendukung <i>Readiness Criteria</i> (RC) dan serah terima aset.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Bab II

Bab II
Bab II

Tujuan dan Sasaran



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, BP3KP Sumatera V menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2) persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4) persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - 5) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - 6) persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - 7) persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - 8) persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;

- 9) persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - 10) persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola BP3KP Sumatera V.

II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

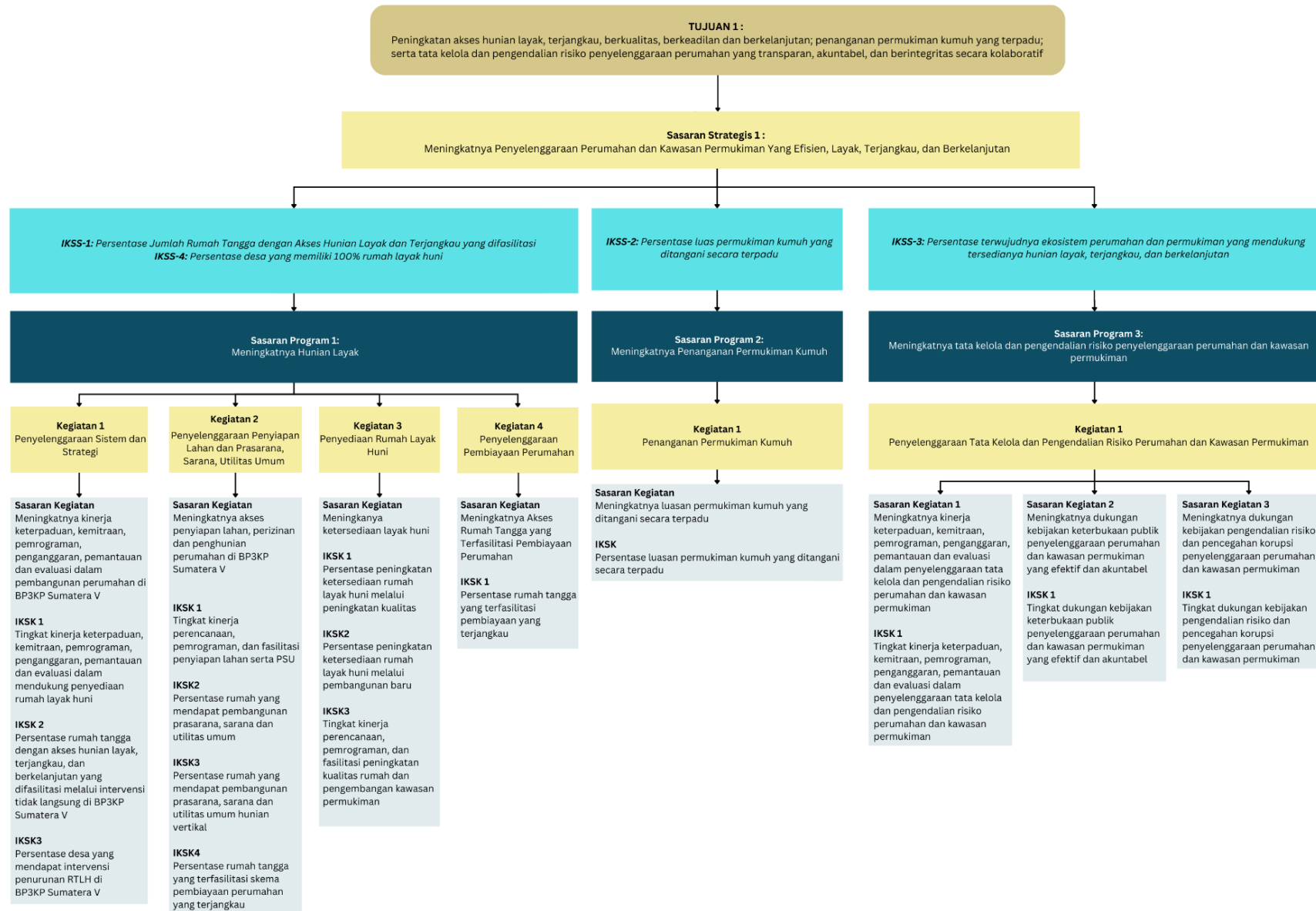
Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, maka disusun sasaran program BP3KP Sumatera V sebagai berikut:

- a. Meningkatnya hunian layak;
- b. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;
- c. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Sumatera V.

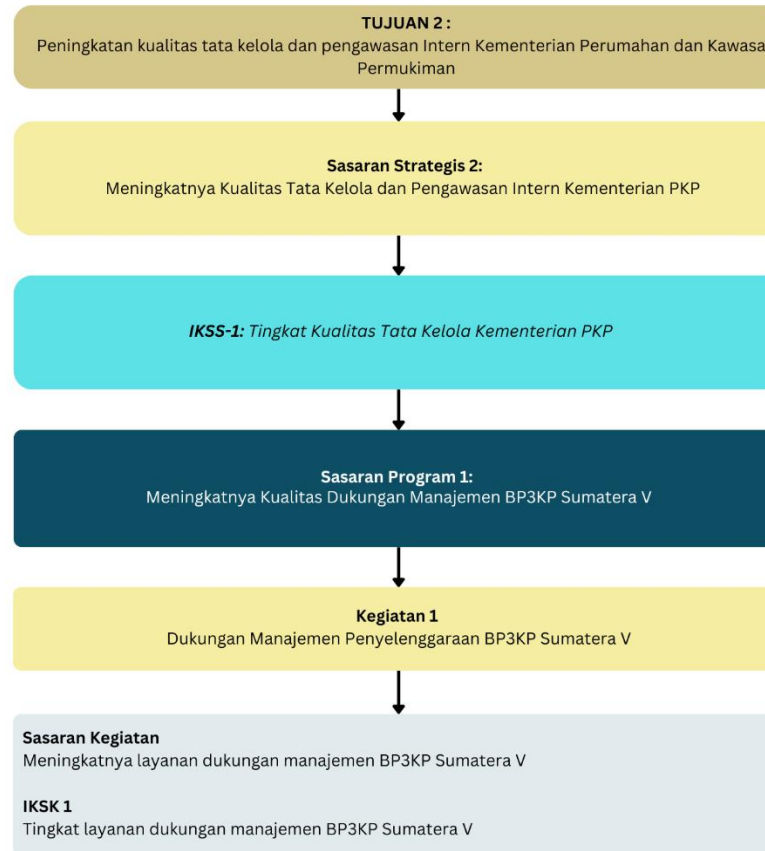
Sasaran Program BP3KP Sumatera V dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. Berikut merupakan tabel penjabaran mulai dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan BP3KP Sumatera V (Tabel 2.1) beserta Pohon Strategisnya (Gambar 2.1).

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan BP3KP Sumatera V

Sasaran Program		Kegiatan		Sasaran Kegiatan
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
1	Meningkatnya Hunian Layak	1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera V
		2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera V
		3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni
		4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1	Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1) Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
				2) Meningkatkan dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
				3) Meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP				
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera V	1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan BP3KP Sumatera V	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Sumatera V



Gambar 2. 1 Pohon Strategis BP3KP Sumatera V (Sasaran Strategis 1)



Gambar 2. 2 Pohon Strategis BP3KP Sumatera V (Sasaran Strategis 2)

Bab III
Bab III
Bab III

**Arah Kebijakan,
Strategi,
dan Kerangka
Kelembagaan**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Guna merealisasikan target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai amanat RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, diperlukan penyelarasan kebijakan dan strategi secara menyeluruh di setiap unit kerja. Seluruh entitas unit organisasi mengemban mandat yang saling melengkapi demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara akuntabel.

Dalam hal ini, lima pilar unit organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman —yakni Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Sekretariat Jenderal, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko—melaksanakan peran strategisnya masing-masing untuk menopang capaian nasional. Kebijakan teknis di tingkat unit kemudian diterjemahkan menjadi prioritas pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian.

III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, berperan menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk menjalankan program dukungan manajemen yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*).

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal dalam rencana strategis diarahkan untuk menjamin tata kelola yang responsif dan akuntabel guna mendukung

pencapaian strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Strategi pelaksanaan kebijakan difokuskan pada:

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci berbasis data dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan • Integrasi antara perencanaan dan penganggaran dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Transformasi digital dan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi digital dalam layanan administrasi kepegawaian pelayanan publik pengelolaan data dan informasi serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan • Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3	Penguatan sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berbasis analisis beban kerja dan kompetensi; • Pengembangan manajemen talenta aparatur sipil negara melalui pelatihan promosi berbasis merit pemetaan karier serta pembentukan balai kompetensi; dan • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh bidang fungsional termasuk keuangan, pengadaan, pembinaan peraturan perundang undangan dan advokasi hukum, komunikasi dan data.
4	Penguatan sistem informasi dan data	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan • Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan perencanaan dan evaluasi program berbasis bukti.
5	Peningkatan layanan dukungan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan pengelolaan kearsipan protokoler serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan • Penguatan layanan keamanan ketertiban dan kehumasan secara profesional dan responsif.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
6	Percepatan regulasi dan advokasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan sumber daya manusia di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan • Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
7	Modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan • Peningkatan akuntabilitas pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8	Penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa,	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia di bidang pengadaan; dan • Integrasi perencanaan penganggaran serta pengadaan pemanfaatan dengan sistem <i>e-procurement</i> untuk efisiensi dan transparansi.
9	Penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria komunikasi publik penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan • Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
10	Kolaborasi dan pendanaan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan serta sumber pendanaan nonanggaran pendapatan dan belanja negara; dan • Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti kredit program perumahan secara terarah dan akuntabel;

III.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2025–2029, telah dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada empat pilar utama. Setiap pilar kebijakan dijabarkan melalui strategi pembangunan kawasan permukiman untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah dirumuskan serta mendukung ketercapaian sasaran Renstra.

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya• Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi• Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau• Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak & vertikal
2	Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya• Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung kapasitas <i>stakeholder</i> perumahan dan masyarakat• Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang
3	Meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none">• Pendampingan dan penguatan Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu• Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran)

No.	Arah Kebijakan	Strategi
4	Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman • Peningkatan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan • Peningkatan pendataan dan <i>monitoring</i> evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman • Memberikan pembinaan pada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan • Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan • Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR

III.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap hunian layak dan terjangkau melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif secara kolaboratif. Strategi pelaksanaan kebijakan diarahkan melalui:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan; • Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan; • Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan di wilayah perdesaan; • Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria
2	Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan; • Pengembangan skema tabungan berencana; • Pengembangan bantuan tunai yang terintegrasi dengan program pembangunan desa; • Pengembangan skema kredit renovasi rumah dan kredit bangun rumah; • Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan • Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembangunan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan.
3	Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi, serta mengembangkan pola koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan; • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan; • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan; • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; • Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan; • Penyusunan panduan <i>monitoring</i> dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4	Meningkatkan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan; • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; • Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan • Penguatan kelembagaan.

III.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan difokuskan pada Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara di kawasan perkotaan.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan; • Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan; penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di wilayah perkotaan; • Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan • Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2	Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
3	Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
4	Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan; • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; • Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan • Penguatan kelembagaan.
5	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
6	Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
7	Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem <i>monitoring</i>, dan pemutakhiran basis data rumah.
8	Percepatan penghunian	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi rumah susun, pelatihan pengelolaan rumah susun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

III.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diselaraskan dengan arah kebijakan nasional RPJMN Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan, meningkatkan kualitas tata kelola hunian publik dan privat, memperluas dan memperkuat sistem pembiayaan perumahan yang inklusif, serta memperkuat mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko difokuskan pada:

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan tata kelola dan regulasi	Melalui penyusunan dan penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta kebijakan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2	Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan privat	Melalui penguatan pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas penyediaan dan pengelolaan perumahan.
3	Pengembangan dan diversifikasi sistem pembiayaan perumahan	Dengan memperluas skema pembiayaan di luar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memperkuat tata kelola dan regulasi pembiayaan perumahan.
4	Penguatan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan	Melalui pengaturan dan fasilitasi kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem perumahan.
5	Penguatan ekosistem perumahan yang berintegritas dan berkelanjutan	Melalui penerapan tata kelola berbasis <i>governance</i> , <i>risk</i> , <i>compliance</i> , dan <i>financing</i> , termasuk penguatan SPIP, penerapan manajemen risiko, pembangunan zona integritas, sistem manajemen anti penyuapan, serta pemanfaatan sistem informasi pemantauan dan evaluasi.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi lima unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan mandat fungsi balai sebagai unit pelaksana teknis, kondisi eksisting, dan kebutuhan wilayah kerja, kebijakan BP3KP Sumatera V dirumuskan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera V

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi: penyediaan rekomendasi kebijakan pembangunan dan/atau peningkatan kualitas, dan pembiayaan perumahan, penyediaan rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;3. Penyediaan Rumah Layak Huni: pembangunan unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas, pembangunan rumah khusus, pembangunan rusun Penanganan Permukiman Kumuh;4. Penyediaan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;5. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;6. Melakukan koordinasi dengan BUMN dan pihak swasta untuk dapat melaksanakan CSR di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan sosialisasi program perumahan dan kawasan permukiman ke masyarakat secara langsung; dan 8. Melakukan kolaborasi/MoU dengan pihak di luar bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Pelayanan (Perkantoran, Umum, Sarana Internal, Data dan Informasi, dan BMN); 2. Melakukan Sosialisasi Zona Integritas dan Manajemen Risiko ke pihak internal dan eksternal; 3. Meningkatkan pengetahuan pegawai internal BP3KP Sumatera V melalui sosialisasi; dan 4. Menyebarkan informasi kepada <i>stakeholder</i> bidang perumahan dan kawasan permukiman tentang program perumahan melalui sosialisasi berkala.

III.3 Kerangka mengenai perangkat BP3KP yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjabarkan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BP3KP Sumatera V.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP memiliki garis komando langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsinya, Balai tetap melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta Sekretariat Jenderal. BP3KP Sumatera V dalam menjalankan tugas, memiliki fungsi diantaranya:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

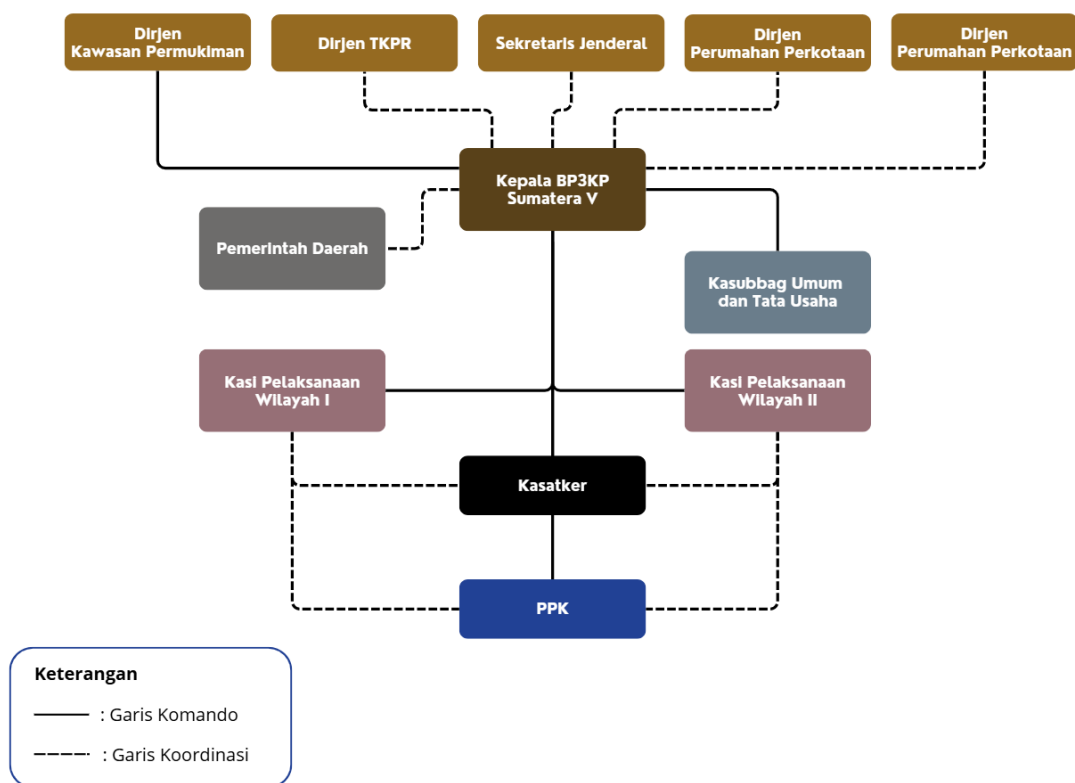
BP3KP memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Di bawah struktur tersebut juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah

untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Sebagai unit pelaksana di daerah, BP3KP memiliki peran dalam memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan kawasan permukiman secara efektif. Melalui pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan program, serta koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan bahwa kebijakan, standar, dan regulasi nasional dapat diterapkan secara konsisten di daerah.

Guna mendukung pelaksanaan peran strategis tersebut, secara kelembagaan BP3KP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi aktif dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Melalui mekanisme koordinatif dan struktur organisasi yang terintegrasi ini, BP3KP berfungsi sebagai penghubung vital antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga penyelenggaraan kawasan permukiman dapat berlangsung lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3. 2 Hubungan Kerja Unit Organisasi (Pusat), UPT (Balai), Perbendaharaan (Kesatkeran), dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat hubungan Kerja Unit Organisasi (Pusat), UPT (Balai), dan Perbendaharaan (Kesatkeran) yakni sebagai berikut.

- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- Kepala Satuan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- PPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II;

- d. Pengelolaan kepegawaian, laporan keuangan dan aset dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Tata Usaha dan atas seizin dan persetujuan Kepala Balai yang selanjutnya dikoordinasikan langsung kepada Sekretariat Jenderal; dan
- e. Balai melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan sinergi pemrograman, penanggulangan bencana, penyediaan lahan, dan pengembangan hunian dengan pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

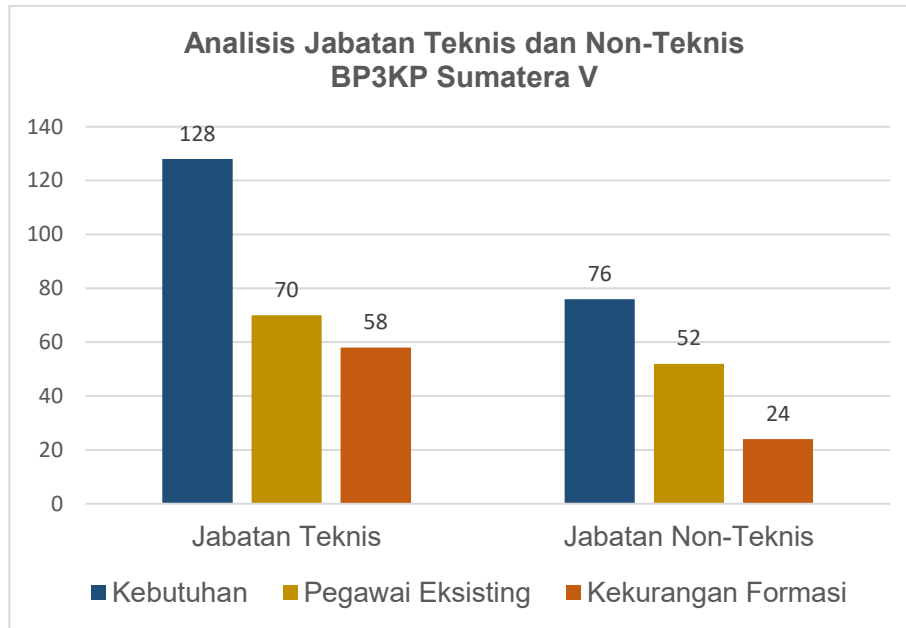
III.4 Analisis Kebutuhan dan Profil Sumber Daya Manusia BP3KP Sumatera V

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Sumatera V sangat bergantung pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan pemetaan beban kerja untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi ideal hingga 5 (lima) tahun ke depan dengan kondisi saat ini.

Analisis ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu:

- a. (K) Kebutuhan Ideal: Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menjalankan fungsi organisasi secara optimal.
- b. (B) Eksisting: Jumlah pegawai (PNS/CPNS/PPPK) yang tersedia saat ini.
- c. (F) Formasi: Selisih atau kekurangan pegawai yang menjadi target pemenuhan ($K - B = F$).

Berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan pada BP3KP Sumatera V, total kebutuhan pegawai ideal (K) teridentifikasi sebanyak 204 formasi. Hingga periode pelaporan ini, jumlah pegawai eksisting (B) tercatat sebanyak 122 orang, sehingga terdapat selisih atau kekurangan (F) sebanyak 82 pegawai. Secara persentase, tingkat keterisian SDM baru mencapai 59,8% dari total kebutuhan organisasi.



Gambar 3. 3 Analisis Jabatan Teknis dan Non-Teknis BP3KP Sumatera V

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi jabatan, komposisi SDM terbagi menjadi dua sektor utama: Jabatan Teknis dan Jabatan Non-Teknis (Administrasi & Pendukung).

a. Sektor Jabatan Teknis

Meliputi jabatan fungsional bidang perumahan, bangunan gedung, serta tim pada Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II. Pada sektor ini, dari total kebutuhan 128 pegawai, baru terpenuhi 70 pegawai, menyisakan kekurangan 58 formasi.

b. Sektor Jabatan Non-Teknis

Meliputi dukungan manajemen pada Subbagian Tata Usaha (Keuangan, SDM, Arsip, dan Operasional). Dari total kebutuhan 76 pegawai, telah terpenuhi 52 pegawai, dengan sisa kebutuhan formasi sebanyak 24 orang.

Kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai ini menjadi tantangan strategis bagi BP3KP Sumatera V dalam periode Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, strategi pemenuhan SDM akan difokuskan pada pengusulan formasi prioritas ke pusat serta peningkatan kompetensi pegawai eksisting melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis.

Bab IV

Bab IV
Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dan dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka telah ditetapkan tujuan dan strategis yang memiliki Indikator Kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2025–2029. Berikut merupakan penjabaran rekapitulasi target kinerja BP3KP Sumatera V untuk tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Target Kinerja BP3KP Sumatera V

Kegiatan/Sasaran/Rincian/Output	2025 – 2029	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		
Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	5	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Dokumen
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	4	Laporan
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Laporan
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Kegiatan
Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	4	Dokumen
Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	15	Laporan
Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	16	Laporan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	6.282	Unit
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	1.332	Unit
Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	3	Dokumen
Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	4	Dokumen
Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	4	Dokumen
Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni		
Jumlah unit rumah swadaya	71.919	Unit
Jumlah rumah khusus yang terbangun	6.340	Unit
Jumlah rumah susun yang terbangun	1.556	Unit

Kegiatan/Sasaran/Rincian/Output	2025 – 2029	
Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	4	Laporan
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	4	Laporan
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4	Laporan
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	4	Laporan
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	3	Laporan
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan		
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Penanganan Permukiman Kumuh		
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	94	Hektar
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4	Laporan
Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	5	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah penerapan manajemen risiko	5	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	4	Rekomendasi Kebijakan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V		
Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	20	Layanan
Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	20	Layanan
Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	16	Layanan
Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	12	Layanan
Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	16	Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	20	Layanan
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	4	Layanan
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4	Layanan
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	4	Layanan
Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	16	Layanan

IV.2 Kerangka Pendanaan

Upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BP3KP Sumatera V periode 2025–2029 membutuhkan dukungan sumber daya yang optimal, meliputi aspek prasarana, regulasi, hingga pendanaan yang bersumber dari APBN maupun Non-APBN. Untuk menjalankan berbagai program prioritas, yang mencakup program perumahan dan kawasan permukiman serta program dukungan manajemen, BP3KP Sumatera V memproyeksikan total indikasi kebutuhan pendanaan sebesar Rp23.074.203.660,69 (Dua puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah enam puluh sembilan sen). Rincian alokasi kebutuhan anggaran untuk mencapai target pembangunan tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera V

Kegiatan/Sasaran/Rincian/Output	2025 – 2029
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	808.768,76
Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	260.149,29
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	184.260,49
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	141.484,70
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	215.770,00
Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	2.892.053,62
Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1.623.669,75
Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	5.460.732,22
Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	823.806,08
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.604.253,94
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	100.205.148
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	14.533.333.333
Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	281.361
Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	12.571.073
Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	1.579.236
Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	455.261
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Jumlah unit rumah swadaya	1.891.762.274
Jumlah rumah khusus yang terbangun	2.893.835.004
Jumlah rumah susun yang terbangun	3.052.115.935
Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	383.720
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	13.113
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	2.291.187
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1.066.612
Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	9.755.598

Kegiatan/Sasaran/Rincian/Output	2025 – 2029
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	839.050
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	520.299
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	13.217.535
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	368.545
Penanganan Permukiman Kumuh	
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	206.270.000
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	352.600
Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	974.608
Jumlah penerapan manajemen risiko	1.218.458
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan	1.044.225
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	
Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	325.447.638
Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	627.294
Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	1.223.569
Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	1.580.407
Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1.452.500
Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	2.792.396
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	52.030
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	61.269
Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	346.866
Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	69.373
Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	346.866
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1.734.329

Bab V
Bab V
Bab V

Penutup



BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat regional merupakan elemen fundamental dalam mendukung pencapaian target nasional. Mengacu pada Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 serta RPJMN 2025–2029, BP3KP Sumatera V berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi *backlog* perumahan dan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar.

Renstra BP3KP Sumatera V ini menegaskan komitmen Balai sebagai pelaksana teknis dan penghubung utama di daerah. Dengan tugas pokok yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, peningkatan kualitas, hingga fasilitasi serah terima aset, BP3KP Sumatera V akan berfokus pada penguatan kapasitas internal, optimalisasi sumber daya, serta sinergi lintas sektor di wilayah kerjanya. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi seluruh unit kerja di lingkungan BP3KP Sumatera V dalam menyelaraskan rencana kerja, mengoptimalkan kinerja, dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dokumen Renstra ini diposisikan sebagai instrumen yang dinamis dan responsif. BP3KP Sumatera V akan menerapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi melalui pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Mekanisme ini berfungsi untuk mengukur efektivitas program dan efisiensi anggaran secara objektif. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan ditemukan deviasi atau target capaian kinerja belum terpenuhi akibat perubahan lingkungan strategis maupun kendala teknis, maka akan

dilakukan langkah korektif melalui mekanisme reuiu Renstra atau penyesuaian target kinerja. Fleksibilitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan tetap relevan, akuntabel, dan solutif terhadap dinamika tantangan yang berkembang selama periode 2025–2029.

Pada akhirnya, keberhasilan agenda pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung sangat bergantung pada kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, Satuan Kerja (Satker) di bawah koordinasi Balai, para pemangku kepentingan, pelaku usaha, masyarakat, serta dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait. Dengan semangat gotong royong, tata kelola yang adaptif, dan integritas yang tinggi, BP3KP Sumatera V optimis dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah kerjanya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera V	1
Lampiran 2 Metode Perhitungan	7

Lampiran I

Lampiran I
Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan



Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera V

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDI KASI LOK ASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi															
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.768,76
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149,29
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	-	-	-	-	4	184.260,49	-	-	-	-	184.260,49
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.484,70
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	215.770	-	-	-	-	215.770,00
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	667.014	703.033	740.997	781.010	2.892.053,62
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	374.478	394.700	416.014	438.478	1.623.669,75
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	3	3	3	3	15	251.711	1.201.392	1.266.267	1.334.646	1.406.716	5.460.732,22
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806,08
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	4	4	4	4	16	-	370.000	389.980	411.039	433.235	1.604.253,94
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	50	1.558	1.558	1.558	1.558	6.282	2.494.669	22.835.503	23.745.284	24.837.021	26.292.671	100.205.148
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	333	333	333	333	1.332	-	3.333.333.333	3.533.333.333	3.733.333.333	3.933.333.333	14.533.333.333
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDI KASI LOK ASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
				-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	2.899.352	3.055.917	3.220.937	3.394.867	12.571.073
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	364.230	383.898	404.629	426.479	1.579.236
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	105.000	110.670	116.646	122.945	455.261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		2.571	17.337	17.337	17.337	17.337	71.919	87.414.000	419.685.427	440.619.855	461.554.282	482.488.710	1.891.762.274
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	1.585	1.585	1.585	1.585	6.340	-	683.047.231	703.504.820	736.929.258	770.353.695	2.893.835.004
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		16	352	396	396	396	1.556	32.000.000	662.648.735	751.726.800	785.822.400	819.918.000	3.052.115.935
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		4	-	-	-	-	4	13.113	-	-	-	-	13.113
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	528.432	556.967	587.044	618.744	2.291.187
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	2.250.000	2.371.500	2.499.561	2.634.537	9.755.598
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		3	-	-	-	-	3	839.050	-	-	-	-	839.050
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	3.048.450	3.213.066	3.386.572	3.569.447	13.217.535
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDI KASI LOK ASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh															
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	34	40	20	-	94	-	71.570.000	88.400.000	46.300.000	-	206.270.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan														
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
SASARAN STRATEGIS 2:															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V															
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	4	4	4	20	25.426.714	69.608.404	73.088.825	76.743.266	80.580.429	325.447.638
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	4	4	4	20	41.548	135.900	142.695	149.830	157.321	627.294

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDI KASI LOK ASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
				-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	282.200	297.439	313.500	330.430	1.223.569
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	3	3	3	3	12	-	364.500	384.183	404.929	426.795	1.580.407
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	335.000	353.090	372.157	392.253	1.452.500
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		4	4	4	4	4	20	59.878	633.976	665.675	698.959	733.907	2.792.396
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	12.000	12.648	13.331	14.051	52.030
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	16.000	16.864	17.775	18.734	69.373
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	4	4	4	4	16	-	400.000	421.600	444.366	468.362	1.734.329

Lampiran II

Lampiran II
Lampiran II

Metode Perhitungan



Lampiran 2 Matriks Metode Perhitungan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1:					
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai P3KP Sumatera V	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut:	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
			2025: 1 kegiatan 2026: - kegiatan 2027: - kegiatan 2028: - kegiatan 2029: - kegiatan Total: 1 kegiatan		
		OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2026: 3 laporan 2027: 3 laporan 2028: 3 laporan 2029: 3 laporan Total: 15 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2026: 4 laporan 2027: 4 laporan 2028: 4 laporan 2029: 4 laporan Total: 16 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SK 1 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana,	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai P3KP	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perumahan di Balai P3KP Sumatera V	prasarana, sarana dan utilitas umum	sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 50 unit 2027: 1.558 unit 2029: 1.558 unit 2026: 1.558 unit 2028: 1.558 unit Total: 6.282 unit		
IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 333 unit 2029: 333 unit 2026: 333 unit 2028: 333 unit Total: 1332 unit	Non Kumulatif	Internal
IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3 Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: - dokumen 2028: 1 dokumen Total: 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
		OK 6 Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2.571 unit 2027: 17.337 unit 2029: 17.337 unit 2026: 17.337 unit 2028: 17.337 unit Total: 71.919 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 1.585 unit 2029: 1.585 unit 2026: 1.585 unit 2028: 1.585 unit Total: 6.340 unit	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 16 unit 2027: 396 unit 2029: 396 unit 2026: 352 unit 2028: 396 unit Total: 1.556 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total: 3 laporan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		OK 10 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan					
SK 1 Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai P3KP Sumatera V Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: - Ha 2027: 40 Ha 2029: - Ha 2026: 34 Ha 2028: 20 Ha Total: 94 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan,	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan,	OK 1 Jumlah laporan pemantauan dan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai P3KP Sumatera V mulai tahun 2026	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
		(Sekretariat Jenderal)	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total: 20 layanan		
		OK 3 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total: 16 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total: 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total: 16 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 4 layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total: 20 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah Layanan BMN	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Sumatera V	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
		(Ditjen Kawasan Permukiman)	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan		
		OK 11 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai P3KP Sumatera V Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai P3KP Sumatera V Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 4 layanan 2029: 4 layanan 2026: 4 layanan 2028: 4 layanan Total: 16 layanan	Non Kumulatif	Internal



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA